GeoScienceEd *7(4) (2026)*

Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika

http://jpfis.unram.ac.id/index.php/GeoScienceEdu/index

Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Berbasis Komunitas di Pantai Cemara Lombok Barat

Tuti Alawiah[1]*, Syafril[1], Junaidin[1]

[1] Universitas Muhammadiyah Mataram

DOI: https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i4.3428

Article Info:
Received : 21 Agustus 2026
Revised : 15 September 2026
Accepted : 28 September 2026
Published : 18 Oktober 2026

Correspondence:

Tuti Alawiah

Phone:

Abstract: The success of community-based mangrove ecotourism depends not only on the abundance of natural resources but also on the community's capacity to build trust, social networks, shared norms, and collective action, which are conceptually known as social capital. This study aimed to describe the forms and roles of community social capital in the development of Cemara Beach Mangrove Ecotourism in West Lombok, particularly in addressing ecosystem degradation, facility damage, and waste management issues in the area. This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with tourism managers, community leaders, traders, and youth, as well as field observations. The data were subsequently analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings revealed that the mangrove area increased from 44.75 hectares in 1990 to 88.83 hectares in 2024. Nevertheless, approximately 64.52 hectares were recorded as degraded in 2022, with waste (40%), coastal abrasion (30%), land-use conversion (15%), and illegal logging (15%) identified as the main contributing factors. Of these factors, 70% were attributed to human activities and 30% to natural processes. Trust, social networks, and mutual cooperation norms have developed among tourism managers and community members; however, these elements have not yet been fully institutionalized into sustained collective responsibility. This gap indicates that social capital alone is insufficient to ensure sustainable ecotourism management without institutional mechanisms, a clear division of responsibilities, and stronger youth participation. This study recommends strengthening local institutions, implementing environmental education programs for tourists, and engaging young people through more structured initiatives to transform social capital into concrete and sustainable collective action in community-based mangrove ecotourism management.

Keywords: Social Capital; Mangrove Ecotourism; Community-Based Ecotourism; Community Participation; Cemara Beach; West Lombok.

Citation: Tuti Alawiah, Syafril, & Junaidin. (2026). Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Berbasis Komunitas di Pantai Cemara Lombok Barat. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, *7*(4), 6237–6245. https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i4.3428

Pendahuluan

Peran penting secara ekologis sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari ancaman abrasi, ekosistem mangrove juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena berpotensi menjadi daya tarik bagi pengembangan pariwisata berbasis lingkunga (Suriadi et al., 2024). Perubahan orientasi wisatawan yang kini semakin condong pada wisata bernuansa konservasi turut mendorong berbagai wilayah pesisir, salah satunya Pantai Cemara di Lombok Barat, untuk mengembangkan ekowisata mangrove sebagai upaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga dan menjaga kelestarian lingkungan.

Meskipun demikian, keberhasilan pengelolaan ekowisata yang berbasis komunitas tidak semata-mata bergantung pada melimpahnya sumber daya alam,

Email: tuti78562@gmail.com

Copyright © 2026, Tuti Alawiah, Syafril, & Junaidin. (2026).
This open access article is distributed under a (CC-BY License

tetapi lebih ditentukan oleh sejauh mana masyarakat mampu membangun organisasi, menumbuhkan rasa saling percaya, dan menjalin kerja sama dalam mengelola sumber daya secara bersama-sama. Kapasitas kolektif semacam ini, dalam ranah ilmu sosial, lazim disebut sebagai modal sosial (social capital), yakni suatu konsep yang menggambarkan bagaimana ikatan sosial dapat berfungsi sebagai sumber daya yang produktif bagi kemajuan suatu komunitas . Hal tersebut diperkuat oleh temuan dalam pengelolaan ekowisata berbasis komunitas di Afrika Selatan, yang menegaskan bahwa penanaman investasi pada modal sosial yang bersifat kolaboratif (Hanif Anwar, 2026).

Secara konseptual, para pakar memberikan pemaknaan yang beragam terhadap modal sosial, meskipun pada dasarnya bermuara pada gagasan yang sama, yakni relasi sosial sebagai suatu sumber daya (Syahra, 2003). Memaknai modal sosial sebagai sumber daya yang tertanam dalam struktur hubungan sosial dan dapat digunakan oleh pelaku untuk mewujudkan tujuan bersama. Sementara itu menyoroti tiga komponen pokok modal sosial, yaitu kepercayaan (trust), norma (norms), serta jaringan (networks), yang berfungsi memudahkan terjadinya koordinasi dan kerja sama demi kepentingan Bersama (Syahra, 2023). Berbeda dari itu menempatkan kepercayaan sebagai unsur sentral modal sosial yang membuat masyarakat dapat menjalin kerja sama tanpa perlu terikat pada kontrak formal memandang modal sosial sebagai sumber daya, baik yang bersifat nyata maupun potensial, yang berkaitan erat dengan kepemilikan jaringan relasi yang stabil dan berkelanjutan. Keterkaitan unsur-unsur tersebut dengan konteks ekowisata mangrove berbasis komunitas diperlihatkan melalui penelitian pada Komunitas Muara Baimbai, Sumatera Utara, yang mengungkap bahwa terjalinnya kepercayaan, jaringan, dan kelembagaan lokal yang efektif menjadi penentu utama keberhasilan pengelolaan ekowisata mangrove secara berkelanjutan (Panjaitan, 2025) .

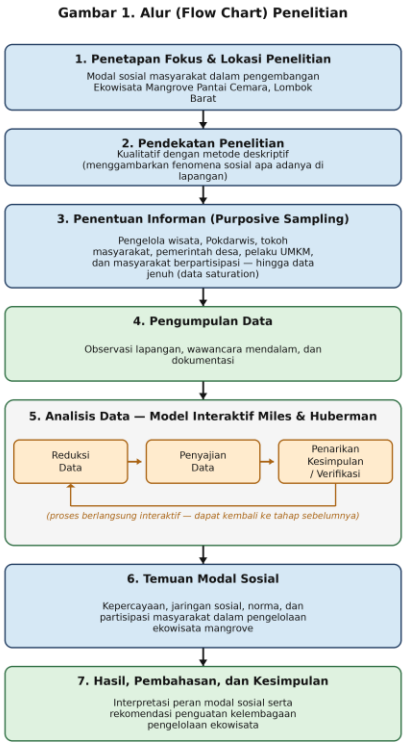
Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa modal sosial memegang peranan yang krusial dalam pengembangan ekowisata, kendati temuan yang dihasilkan tidak selalu konsisten. (Fikri et al., 2026) misalnya, mendapati bahwa terjalinnya kerja sama antara kelompok sadar wisata dengan kelompok masyarakat pengawas dapat mendorong tercapainya keberhasilan dalam pengembangan ekowisata mangrove. Keberadaan ekowisata tidak selalu berdampak signifikan secara ekonomi apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah serta kapasitas pengelolaan yang dimiliki masih lemah. Sejalan dengan hal itu, (Augia & Dharmawan, 2025) melalui kajiannya mengenai pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Wisata Lumbung Stroberi, Kota Batu, turut menyatakan bahwa modal sosial yang tumbuh dari kolaborasi antarwarga berperan sebagai penggerak utama keberlanjutan destinasi wisata berbasis komunitas (Hanif Anwar, 2026). Adanya perbedaan hasil temuan tersebut menegaskan bahwa modal sosial tidak dapat dipandang sekadar sebagai faktor pendukung, melainkan sebagai variabel penentu yang menentukan berhasil atau gagalnya tindakan kolektif dalam mengelola sumber daya bersama, sebagaimana diuraikan melalui teori aksi kolektif (collective action) mengenai pengelolaan sumber daya milik bersama (common-pool resources).

Penelitian ini menetapkan Pantai Cemara, Kabupaten Lombok Barat, sebagai lokasi kajian dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut memiliki ekosistem mangrove yang kondisinya relatif masih terpelihara dan pengelolaannya dijalankan secara swadaya oleh masyarakat setempat, sebuah karakteristik yang membedakannya dari beberapa kawasan ekowisata lain di Lombok Barat yang pengelolaannya lebih didominasi oleh peran pemerintah desa maupun pihak dari luar komunitas (Imran & Efendi, 2026) . Karakteristik masyarakat pesisir di Pantai Cemara yang kehidupannya masih sangat bergantung pada sumber daya di sekitar kawasan mangrove menjadikan lokasi ini sesuai untuk ditelaah lebih jauh mengenai bagaimana relasi sosial, kepercayaan, dan jaringan antarwarga tumbuh serta berperan dalam menopang pengelolaan ekowisata berbasis komunitas. Dalam konteks kepulauan Lombok, modal sosial beserta aksi kolektif terbukti menjadi penopang utama ketahanan masyarakat pesisir dalam menghadapi berbagai tekanan pada sektor pariwisata, sebagaimana diperlihatkan oleh (Ziad et al., 2026) melalui kajiannya di Gili Trawangan, Lombok. Penetapan lokasi Pantai Cemara turut didasarkan pada pertimbangan bahwa dinamika modal sosial akan lebih mudah teramati pada kawasan yang pengelolaannya digerakkan langsung oleh komunitas, dibandingkan pada kawasan yang pengelolaannya lebih banyak dikendalikan oleh aktor eksternal, sejalan dengan gagasan community-based tourism yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan pariwisata (Ferdiansyah et al., 2025).

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif. Pemilihan metode deskriptif didasarkan pada tujuan penelitian ini, yaitu untuk memaparkan, menjabarkan, serta menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran modal sosial dalam pengembangan ekowisata mangrove berbasis komunitas di Pantai Cemara, Lombok Barat, sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan, tanpa dimaksudkan

untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis tertentu (Tanjung & Albina, 2025). Dengan menerapkan metode ini, peneliti berupaya mengurai secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan kepercayaan, jaringan sosial, norma, kerja sama, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata, termasuk keadaan riil di lapangan seperti kerusakan sarana jembatan akses maupun persoalan sampah pada kawasan wisata seperti pada gambar 1.



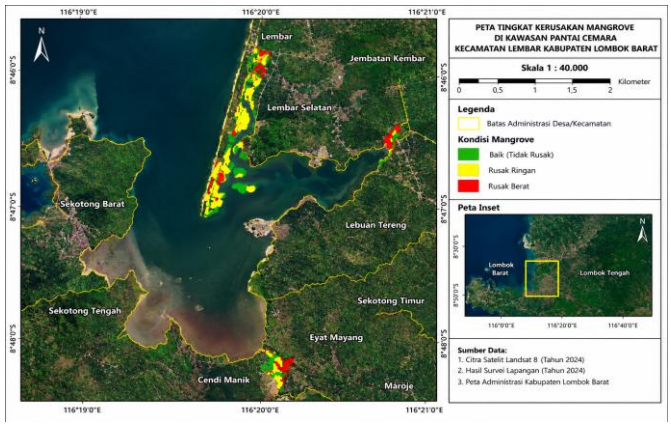
Gambar 1. Alur penelitian

Kegiatan penelitian ini berlokasi di kawasan Ekowisata Mangrove Pantai Cemara, Kabupaten Lombok Barat. Penentuan informan dilakukan dengan menerapkan teknik purposive sampling, yakni memilih pihak-pihak yang dinilai memahami serta terlibat secara langsung dalam pengembangan ekowisata mangrove, meliputi pengelola wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa, pelaku UMKM, serta warga yang turut berperan dalam pengelolaan kawasan wisata.

Banyaknya informan ditetapkan mengacu pada prinsip kejenuhan data (data saturation), sehingga kegiatan pengumpulan data dihentikan pada saat informasi yang diperoleh sudah menunjukkan pengulangan dan tidak lagi memunculkan data baru. Pengumpulan data dilaksanakan melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam, serta penelusuran dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga dihasilkan gambaran deskriptif yang menyeluruh mengenai peran modal sosial dalam pengembangan ekowisata mangrove berbasis komunitas di Pantai Cemara, Lombok Barat

Hasil dan Diskusi

Ekowisata mangrove merupakan salah satu wujud pengembangan pariwisata berkelanjutan yang memadukan antara upaya pelestarian lingkungan, penguatan peran masyarakat, dan peningkatan taraf ekonomi warga setempat. Gagasan ini menjadikan kelestarian ekosistem mangrove sebagai landasan pokok dalam mengelola destinasi wisata, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaan Kawasan (Nicha & Zulkarnaini, 2025). Dalam kerangka ekowisata berbasis komunitas, tingkat keberhasilan pengelolaan kawasan tidak semata-mata bergantung pada kekayaan sumber daya alam yang tersedia, melainkan turut dipengaruhi oleh kuatnya modal sosial di kalangan masyarakat, seperti rasa saling percaya, jaringan sosial, norma-norma yang berlaku, serta kerja sama yang memicu lahirnya tindakan kolektif (Maretha et al., 2025).



Gambar 2. Peta Tingkat Kerusakan Kawasan

Bagian ini memaparkan gambaran deskriptif atas kondisi Ekowisata Mangrove Pantai Cemara, Lombok Barat, yang mencakup latar belakang perkembangannya, ciri khas kawasan, kelengkapan sarana-prasarana pendukung, termasuk keadaan jembatan akses serta pengelolaan sampah, tingkat kelestarian ekosistem mangrove, dan wujud keterlibatan masyarakat maupun para pemangku kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata. Paparan deskriptif atas berbagai aspek tersebut menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana modal sosial turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan

ekowisata mangrove berbasis komunitas yang berkelanjutan di Pantai Cemara, Lombok Barat (Amanah et al., 2026).

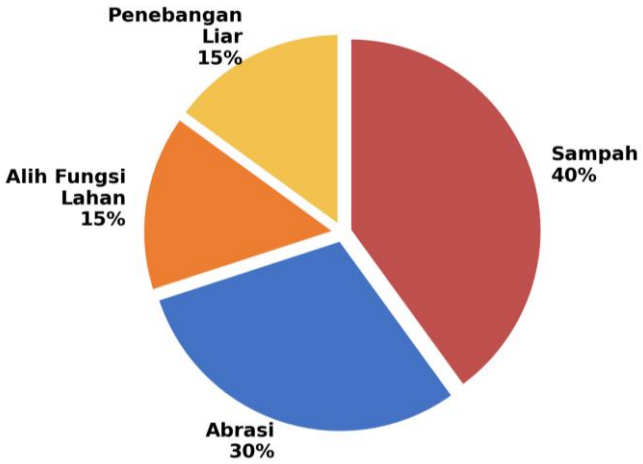
Mengacu pada data hasil pemantauan kawasan, luas mangrove di Pantai Cemara pada tahun 1990 tercatat mencapai 44,75 hektare. Berkat berbagai upaya pemantauan dan rehabilitasi yang melibatkan peran pengelola bersama masyarakat, luas kawasan tersebut tercatat mengalami kenaikan menjadi 88,83 hektare pada tahun 2024, atau bertambah hampir dua kali lipat dibandingkan luas awalnya. Kenaikan tersebut selaras dengan pandangan (Suci et al., 2021) yang menyatakan bahwa upaya rehabilitasi berbasis komunitas mampu memperluas sekaligus memulihkan ekosistem mangrove multikultural di wilayah pesisir Indonesia.

Mangrove di Kecamatan Lembar

Kendati luas kawasan memperlihatkan tren peningkatan, data pemantauan turut mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat sekitar 64,52 hektare kawasan yang berada dalam kondisi rusak. Berdasarkan hasil wawancara, pihak pengelola wisata menerangkan bahwa kerusakan tersebut dipicu oleh sejumlah faktor utama, yakni pencemaran akibat sampah, abrasi di kawasan pantai, serta alih fungsi lahan (Susanti et al., 2026). Pengelola menyampaikan, "Salah satu penyebab kerusakan kawasan mangrove di sini adalah pencemaran sampah, baik sampah plastik maupun limbah rumah tangga yang menumpuk di area pesisir sehingga mencemari lingkungan dan mengganggu pertumbuhan mangrove. Selain itu, abrasi pantai akibat pengikisan garis pantai oleh gelombang air laut turut merusak akar dan struktur tanah tempat mangrove tumbuh.

Ada juga persoalan konversi lahan, yaitu alih fungsi sebagian kawasan mangrove menjadi area permukiman, fasilitas umum, atau tambak tanpa memperhatikan perencanaan lingkungan yang baik."Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa faktor alam seperti abrasi bukanlah satu-satunya penyebab kerusakan kawasan mangrove di Pantai Cemara, melainkan turut dipengaruhi oleh campur tangan manusia, berupa pencemaran akibat sampah maupun alih fungsi lahan yang belum disertai perencanaan lingkungan secara memadai. Kondisi ini mencerminkan adanya semacam paradoks ekologis, di mana bertambahnya luas kawasan mangrove secara kuantitatif nyatanya belum diimbangi oleh terjaganya kualitas ekosistem secara menyeluruh di setiap wilayah. Hal tersebut sekaligus memperkuat gambaran bahwa modal sosial yang dimiliki masyarakat, sekalipun memberikan kontribusi berarti dalam mendorong perluasan area rehabilitasi, ternyata belum sepenuhnya mampu diwujudkan menjadi tindakan kolektif yang konsisten dan berkelanjutan guna mengatasi tekanan berupa pencemaran, abrasi, maupun konversi lahan yang tengah dihadapi kawasan mangrove tersebut (Ahdarrijal et al., 2025).

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komposisi faktor penyebab kerusakan kawasan mangrove sebagaimana diungkapkan pengelola wisata dalam wawancara, hasil identifikasi tersebut selanjutnya dikuantifikasi ke dalam empat kategori faktor dengan proporsi yang secara keseluruhan mencapai 100 persen, meliputi sampah sebesar 40 persen, abrasi pantai sebesar 30 persen, alih fungsi lahan sebesar 15 persen, serta penebangan liar sebesar 15 persen, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2. Tingginya persentase faktor sampah dibandingkan faktor lainnya sejalan dengan temuan observasi lapangan peneliti yang mengungkap bahwa persoalan sampah di kawasan wisata belum ditangani secara maksimal (Sidabutar, 2025).

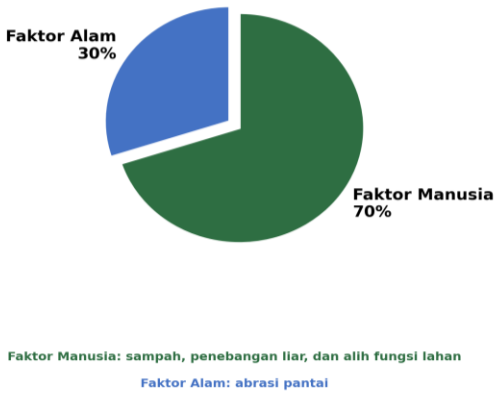


Gambar 2. Presentase Faktor Penyebab Kerusakan Ekosistem Mangrove

Ketika keempat faktor tersebut dikelompokkan menurut sumber penyebabnya, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3, terlihat bahwa faktor yang berasal dari aktivitas manusia, yakni sampah, penebangan liar, dan alih fungsi lahan, secara akumulatif berkontribusi sebesar 70 persen terhadap keseluruhan penyebab kerusakan, sementara faktor alam berupa abrasi pantai hanya berkontribusi sebesar 30 persen (Suleman & Bur, 2023). Perbandingan proporsi ini memperlihatkan bahwa kerusakan ekosistem mangrove di Pantai Cemara lebih banyak dipicu oleh aktivitas manusia yang belum disertai kesadaran dan pengelolaan lingkungan yang memadai, dibandingkan dengan faktor alam yang sulit dikendalikan secara langsung oleh masyarakat. Temuan ini

mengindikasikan bahwa persoalan sampah, penebangan liar, dan alih fungsi lahan bukan hanya menyangkut aspek teknis semata, melainkan juga mencerminkan bahwa penegakan norma serta keterlibatan bersama masyarakat dalam menjaga sumber daya milik bersama masih belum berjalan secara optimal, sebagaimana diuraikan dalam konsep pengelolaan sumber daya milik bersama (common-pool resources) menurut (Kembauw et al., 2024) .

Di sisi lain, kontribusi abrasi sebesar 30 persen memperlihatkan bahwa kerusakan ekosistem mangrove turut dipengaruhi oleh faktor alam yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya secara langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan modal sosial perlu diarahkan bukan hanya pada pengelolaan sampah dan penataan lahan, melainkan juga pada upaya mitigasi kolektif terhadap abrasi, misalnya melalui program penanaman kembali mangrove pada wilayah yang rentan mengalami abrasi.



Gambar 3. Perbandingan Faktor Manusia dan Faktor Alam Penyebab Kerusakan Ekosistem Mangrove

Di luar aspek ekologis, kondisi infrastruktur penunjang wisata pada kawasan ini pun masih dibayangi sejumlah persoalan. Akses jalan menuju maupun di sekitar kawasan wisata Pantai Cemara dinilai belum memadai, mengingat beberapa ruas masih berupa jalan setapak yang sama sekali belum diaspal. Situasi ini kerap menjadi keluhan warga sekitar maupun pelaku usaha karena dianggap menyulitkan wisatawan untuk mencapai kawasan tersebut (Krismunandar & Murianto, 2024).

Persoalan yang tergolong lebih genting terletak pada jembatan penyeberangan berbahan kayu yang berfungsi sebagai akses utama kawasan, yang pernah mengalami kerusakan cukup parah sehingga membahayakan pengunjung, bahkan sampai mengakibatkan kendaraan pengunjung terperosok. Menanggapi kondisi tersebut, warga bersama pengelola setempat melakukan perbaikan secara mandiri lewat kegiatan gotong royong, yang merupakan wujud konkret dari modal sosial berupa kepercayaan dan norma kerja sama, sebagaimana akan diulas lebih mendalam pada bagian selanjutnya, kendati sifatnya masih bersifat sesaat dan belum menuntaskan persoalan mendasar berupa pelapukan material kayu di lingkungan pesisir sebagaimana diungkap (lie Tjhing et al., 2024).

Kelengkapan fasilitas kebersihan dan sanitasi di kawasan ini pun tergolong terbatas. Ketersediaan tempat sampah atau bak sampah resmi di sepanjang wilayah pesisir masih jauh dari mencukupi untuk menampung volume sampah hasil aktivitas wisatawan, selaras dengan temuan (Sembiring et al., 2025) bahwa minimnya fasilitas pembuangan sampah turut memperparah persoalan sampah di destinasi wisata pesisir. Fasilitas toilet atau MCK (mandi, cuci, kakus) yang dikelola secara resmi di kawasan pantai juga sangat terbatas, sehingga wisatawan kerap harus memanfaatkan fasilitas MCK milik warga sekitar kawasan pantai. Dari sisi kelistrikan, jaringan listrik pada umumnya sudah menjangkau masyarakat dan warung-warung di sekitar permukiman dekat pantai, namun penerangan jalan umum (PJU) atau instalasi listrik di sepanjang jalur wisata masih sangat minim, sehingga berpotensi menimbulkan risiko dari sisi keamanan maupun kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung pada sore hingga malam hari. Secara umum, kondisi ekologis serta sarana-prasarana tersebut menjadi latar penting yang mendasari pembahasan mengenai peran modal sosial pada bagian berikutnya, sekaligus menegaskan bahwa terbatasnya infrastruktur menjadi tantangan tersendiri di samping persoalan kelembagaan modal sosial itu sendiri.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa modal sosial pada kawasan Ekowisata Mangrove Pantai Cemara sudah terbangun dalam wujud kepercayaan, jaringan sosial, dan norma yang menopang kerja sama antarpelaku wisata, namun belum sepenuhnya terwujud menjadi tanggung jawab kolektif dalam memelihara fasilitas dan menjaga kebersihan kawasan. Pengelola wisata mengungkapkan bahwa masyarakat sekitar kerap dilibatkan lewat kegiatan gotong royong untuk membersihkan kawasan dan merawat fasilitas wisata, serta bahwa komunikasi senantiasa dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan setiap kegiatan sebagai fondasi relasi kerja sama yang baik.

Tokoh masyarakat pun menegaskan bahwa dukungan warga terhadap eksistensi ekowisata tergolong kuat, tercermin dari kebiasaan bergotong royong serta norma sosial yang senantiasa mengingatkan warga untuk tidak merusak kawasan mangrove. Kendati demikian, hasil pengamatan lapangan mengungkap adanya jarak antara modal sosial

yang telah terbangun tersebut dengan realitas di lapangan: jembatan kayu selaku akses utama kawasan mengalami pelapukan dan kerusakan pada sejumlah bagian, sementara sampah plastik masih menumpuk di beberapa titik kawasan pesisir. Pola yang serupa turut ditemukan (Nafsi & Sitohang, 2026) kawasan wisata berbasis komunitas di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bahwa modal sosial memang berperan signifikan dalam mendorong partisipasi masyarakat, namun keberlanjutannya tetap ditentukan oleh penguatan fungsi kelembagaan pendukung. Dengan demikian, temuan pokok penelitian ini adalah munculnya jarak antara tersedianya modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma dengan pemanfaatannya secara maksimal dalam tindakan kolektif guna merawat sarana dan menjaga lingkungan wisata.

Temuan ini menjadi krusial karena memperlihatkan bahwa hadirnya modal sosial semata tidak lantas menjamin keberlangsungan pengelolaan ekowisata berbasis komunitas, sebagaimana dikemukakan (Nafsi & Sitohang, 2026) bahwa modal sosial baru akan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan komunitas apabila senantiasa diinvestasikan dan dikelola secara terarah, bukan dibiarkan berkembang begitu saja. Kepercayaan dan norma sosial yang tergolong cukup baik nyatanya belum mampu mendorong tanggung jawab bersama yang berkesinambungan dalam merawat fasilitas maupun menjaga kebersihan kawasan. Informan dari kalangan pemuda mengungkapkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam kegiatan bersih-bersih maupun promosi wisata lewat media sosial memang sudah berjalan, tetapi belum merata di antara para pemuda, sehingga dibutuhkan lebih banyak kegiatan yang melibatkan mereka agar timbul rasa kepemilikan terhadap kawasan wisata.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil tinjauan sistematis kepariwisataan Indonesia berbasis basis data Scopus, yang menyoroti bahwa pelibatan kalangan muda masih menjadi salah satu kendala utama dalam riset maupun praktik community-based tourism di Indonesia. Baik secara teoretis maupun praktis, makna penting dari temuan ini adalah bahwa modal sosial perlu disertai mekanisme kelembagaan yang tegas, seperti pembagian tugas pemeliharaan, penjadwalan perawatan fasilitas, dan sistem pengelolaan sampah yang tertata, agar potensi sosial yang sudah ada dapat benar-benar dimanfaatkan secara berkelanjutan dan tidak sekadar berhenti pada tahap kepercayaan dan norma semata (Niam et al., 2025).

Temuan mengenai hadirnya kepercayaan dan norma gotong royong di antara pengelola dan masyarakat selaras dengan ekspektasi teoretis modal sosial bahwa kepercayaan, norma, dan jaringan berperan memudahkan koordinasi serta kerja sama demi kepentingan bersama. Pola komunikasi yang senantiasa dijaga pengelola sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagaimana diungkapkan informan pengelola, turut sejalan dengan pandangan (Gani et al., 2025) bahwa kepercayaan memungkinkan terjalinnya kerja sama tanpa harus bergantung pada kontrak formal.

Temuan ini memandang modal sosial sebagai sumber daya yang tertanam dalam struktur relasi sosial dan dapat dimanfaatkan pelaku untuk mencapai tujuan bersama, sebagaimana tampak dari pemanfaatan relasi antara pengelola, masyarakat, pedagang, dan pemuda dalam kegiatan wisata. Akan tetapi, jarak antara kepercayaan yang telah terbangun dengan rendahnya tingkat pemeliharaan fasilitas dan kebersihan kawasan mengindikasikan bahwa modal sosial di Pantai Cemara belum sepenuhnya mencapai tahap sebagaimana dikemukakan (Edward & Indrawati, 2025) yaitu sebagai sumber daya aktual yang benar-benar dapat diubah menjadi manfaat kolektif yang berkesinambungan. Dengan kata lain, hasil penelitian ini pada dasarnya sejalan dengan kerangka konseptual modal sosial yang sudah dipublikasikan sebelumnya, sekaligus menunjukkan bahwa ketiga unsurnya (kepercayaan, jaringan, norma) dapat muncul dalam tingkatan yang berbeda-beda pada setiap aspek pengelolaan.

Penelitian ini turut memperkuat hasil bahwa kepercayaan, jaringan, dan kelembagaan lokal yang berfungsi dengan baik menjadi penentu utama keberhasilan pengelolaan ekowisata mangrove secara berkelanjutan; pada kasus Pantai Cemara, ketiga unsur tersebut turut teridentifikasi, meskipun kelembagaan yang mengatur pemeliharaan fasilitas belum sekuat pada kasus Muara Baimbai. Selaras dengan (Ingamita et al., 2025) yang menemukan bahwa kerja sama antara kelompok sadar wisata dan kelompok masyarakat pengawas mendorong keberhasilan ekowisata, penelitian ini pun menemukan pola kolaborasi antara pengelola, masyarakat, pedagang, dan pemuda, kendati koordinasinya dinilai belum berjalan optimal. Menegaskan bahwa modal sosial hasil kolaborasi antarwarga berperan sebagai penggerak utama keberlanjutan destinasi wisata berbasis komunitas secara kuantitatif membuktikan bahwa modal sosial berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis komunitas di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Di sisi lain, temuan mengenai partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam pemeliharaan fasilitas memberikan tambahan nuansa terhadap temuan (Setiawati & Diliana, 2025), yang menunjukkan bahwa ekowisata tidak selalu memberikan dampak yang berarti apabila partisipasi masyarakat rendah dan kapasitas pengelolaan lemah; pada kasus Pantai Cemara, partisipasi dalam bentuk gotong royong sesungguhnya sudah terbentuk, hanya saja belum

cukup konsisten dan melembaga untuk menopang pemeliharaan sarana secara berkelanjutan (Wilda Ummairah, 2026).

Selain penjelasan bahwa kesenjangan tersebut bersumber dari belum melembaganya modal sosial, ada pula beberapa penjelasan alternatif yang patut dipertimbangkan. Pertama, kerusakan jembatan kayu bisa jadi turut dipengaruhi oleh faktor fisik-lingkungan yang berdiri sendiri di luar kerja sama sosial: kajian (Hermawan, 2019) mengungkap bahwa struktur kayu pada lingkungan pesisir dan laut amat rentan mengalami pelapukan akibat kelembapan, paparan air asin, serta serangan organisme perusak kayu, sehingga kerusakan jembatan di Pantai Cemara mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan mutu material dan anggaran perawatan ketimbang semata lemahnya modal sosial. Kedua, persoalan sampah bisa pula dijelaskan lewat perilaku wisatawan dari luar komunitas yang tidak terikat pada norma setempat; penelitian (Alamsyah et al., 2022) di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, serta (Tumpu et al., 2023) pada kawasan wisata pegunungan di Tiongkok, sama-sama mengungkap bahwa sampah wisata sebagian besar bersumber dari perilaku pengunjung yang kurang memiliki kesadaran lingkungan, bukan semata akibat lemahnya norma masyarakat setempat.

Ketiga, kesenjangan antara kepercayaan yang telah ada dengan minimnya pemeliharaan fasilitas juga dapat dipahami melalui persoalan aksi kolektif pada sumber daya milik bersama sebagaimana dikemukakan (Rustandi et al., 2026) serta diperkuat oleh (Handayani et al., 2026) dalam konteks destinasi wisata, yakni munculnya kecenderungan sebagian pihak menumpang manfaat (free-rider) tanpa memberikan kontribusi yang setara dalam pemeliharaan, sebuah persoalan struktural yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan memperkuat kepercayaan dan norma sosial, melainkan juga membutuhkan mekanisme insentif dan sanksi yang tegas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa modal sosial pada kawasan Ekowisata Mangrove Pantai Cemara, Lombok Barat, telah tumbuh dalam bentuk kepercayaan, jaringan sosial, serta norma gotong royong yang menjadi penopang kerja sama antara pengelola wisata, masyarakat, pedagang, dan pemuda. Wujud kepercayaan tampak dari kesediaan masyarakat untuk turut membantu kegiatan kebersihan dan pengelolaan kawasan, jaringan sosial terbentuk melalui relasi antarpemangku kepentingan yang saling mengisi peran satu sama lain, sementara norma sosial berkembang dalam bentuk kebiasaan menjaga lingkungan serta larangan terhadap perusakan ekosistem mangrove. Meskipun demikian, ketiga unsur modal sosial tersebut belum sepenuhnya berhasil diwujudkan menjadi tindakan kolektif yang melembaga dan bersifat berkelanjutan, sebagaimana tercermin dari kerusakan jembatan akses akibat pelapukan yang belum ditangani secara berkala, persoalan sampah plastik yang masih kerap terjadi di kawasan pesisir, serta keterlibatan pemuda yang masih bersifat sebagian.

Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan modal sosial semata tidak dengan sendirinya menjamin keberlangsungan pengelolaan ekowisata berbasis komunitas apabila tidak disertai mekanisme kelembagaan yang tegas, seperti pembagian tanggung jawab dalam pemeliharaan, penyusunan jadwal perawatan fasilitas, dan sistem pengelolaan sampah yang tertata. Kesenjangan antara kepercayaan yang sudah terbangun dengan masih rendahnya tanggung jawab kolektif dalam pemeliharaan sarana juga dapat dipahami melalui faktor-faktor di luar dimensi sosial, seperti sifat material kayu pada lingkungan pesisir yang mudah lapuk, perilaku sebagian wisatawan yang berasal dari luar komunitas, serta kecenderungan sebagian pihak untuk menikmati manfaat tanpa memberikan kontribusi yang sepadan dalam pemeliharaan bersama.

Dengan demikian, keberlangsungan Ekowisata Mangrove Pantai Cemara di masa mendatang sangat ditentukan oleh kemampuan pengelola beserta masyarakat dalam mentransformasikan modal sosial yang telah dimiliki menjadi kelembagaan kolektif yang lebih kokoh, diiringi penguatan partisipasi pemuda, penyelenggaraan program edukasi lingkungan bagi wisatawan, serta penerapan mekanisme insentif dan sanksi yang mampu mendorong tanggung jawab bersama secara berkesinambungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoretis bagi pengembangan kajian modal sosial dalam ranah pariwisata berkelanjutan, sekaligus kontribusi praktis sebagai landasan perumusan strategi pengelolaan yang lebih melembaga, baik bagi Ekowisata Mangrove Pantai Cemara maupun kawasan ekowisata berbasis komunitas lain yang memiliki karakteristik serupa.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini hingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan.

Referensi

Ahdarrijal, Y., Badrudin, M., & Batubara, E. (2025). Konservasi Ekosistem Mangrove melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kota Batam. DIALEKTIKA PUBLIK, 9(1), 1–10.

Alamsyah, B., Nuraini, C., & Suwarno, B. (2022). Strategi Manajemen Mitigasi Bencana Pesisir Pantai Timur

Sumatera Utara. PUBLIS PENERBIT UNPRI PRESS, 1–81.

Amanah, I., Fikri, M. R., Ramandilla, P., Rahmayani, S., & Munajar, A. (2026). Kajian Potensi Fisik dan Sosial Desa Wisata Pulau Derawan dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Bahari. INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 4(02), 1312–1344.

Augia, R., & Dharmawan, F. A. (2025). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Cuku Nyinyi Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan Menggunakan Pendekatan Analisis SWOT. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 4(1), 121–133.

Edward, R. A., & Indrawati, I. (2025). MODAL SOSIAL POKDARWIS DALAM PENGELOLAAN WISATA IKAN SAKTI SUNGAI JANIAH KENAGARIAN TABEK PANJANG, SUMATERA BARAT. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(4), 1659–1666.

Ferdiansyah, L. F., Afiah, N., Anggriana, S., & Aspri, A. R. (2025). Ketahanan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Gili Trawangan Lombok Utara. Jurnal Ilmiah Hospitality, 14(1), 487–494.

Fikri, S. A. D., Maram, A. N., & Hikami, A. F. (2026). Integration of Islamic Ecotheology in Sustainable Mining Management in Indonesia. REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, 7(1), 122–153.

Gani, K., Azikin, I. S., & Agustan, A. (2025). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN IAKN TORAJA SEBAGAI PRAKTIK KOMUNIKASI: AUDIT PERENCANAAN PESAN, KOORDINASI INTERNAL, DAN TRANSPARANSI PUBLIK. CORE: Journal of Communication Research, 43–63.

Handayani, H. T., Yusuf, M., & Putra, D. S. (2026). Sustainable water resources management berbasis common pool resources (CPR) di Desa Sumber Makmur. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 145–160.

Hanif Anwar, J. (2026). Efektivitas Standar Operasional Prosedur Laboratorium dalam Pembiasaan. 7(3).

Hermawan, H. (2019). GEOWISATA Solusi Pemanfaatan Kekayaan Geologi yang Berwawasan Lingkungan. Jurnal Sains Terapan Pariwisata.

Imran, A., & Efendi, I. (2016). Inventarisasi mangrove di pesisir pantai cemara Lombok Barat. JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, 1(1), 105–112.

Ingamita, Y., Mau, A. O. E., & Kamahi, S. B. (2025). Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan Mangrove:(Studi Kasus di Pantai Litianak Desa Holulai, Kec Loaholu, Kab Rote Ndao). Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik, 2(3), 117–125.

Kembauw, E., Wadjo, H. Z., Silooy, R. W., & Saimima, J. M. (2024). Model pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan: Integrasi aspek ekonomi, lingkungan, dan hukum di Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Indonesian Journal of Management Science, 3(2), 77–85.

Krismunandar, L. K., & Murianto, M. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Cemara Indah Kecamatan Lembar Lombok Barat. Journal Of Responsible Tourism, 3(3), 933–940.

lie Tjhing, M., Rusmini, A., & Lestariningsih, T. (2024). Jaminan keamanan dan keselamatan pengunjung pada destinasi wisata. MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(1), 80–90.

Maretha, A., Suryasih, I. A., & Ariwangsa, I. M. B. (2025). Peran Masyarakat Lokal Terhadap Pembangunan Jalur Trekking Di Desa Telaga Tawang Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. Jurnal Destinasi Pariwisata, 13(2).

Nafsi, A., & Sitohang, L. L. (2026). Analisis Eksploratif Sampah Laut di Wilayah Pesisir Studi Kasus Pantai Labuhan Haji, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 25(1), 1–11.

Niam, M., Qoni'ah, Q., Alfiyani, L., & Putri, D. (2025). Implikasi Modal Sosial dalam Community Based Tourism (CBT) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 12(2), 152–165.

Nicha, A., & Zulkarnaini, Z. (2025). Kebijakan pengembangan ekowisata mangrove berkelanjutan untuk konservasi ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal. Jurnal Ilmiah Research Student, 2(2), 105–114.

Panjaitan, C. B. (2025). STRATEGI KONSERVASI PULAU KECIL MELALUI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS PULAU NIAS, SUMATERA UTARA). Jurnal Sumber Daya Akuatik, 2(1), 30–38.

Rustandi, H., Tivani, T., Tiara, Z. Y., Nurdin, S. M., Daulika, S., & Muhammad, A. (2026). Social Awareness and Ecotheology in Community Waste Management in Sawarna Timur Village. Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 9(1), 147–162.

Sembiring, A., Taofiqurohman, A., Ismail, M. R., & Pamungkas, W. (2025). Evaluasi Keamanan, Fasilitas, Dan Kebersihan Dalam Menjaga Potensi Wisata Bahari Pantai Kejawanan Kota Cirebon. Jurnal Destinasi Pariwisata, 13(2).

Setiawati, N. L. A., & Diliana, W. O. (2025). Pemahaman Pengelola dan Persepsi Wisatawan tentang Kelayakan Finansial dan Dampak Pengelolaan Ekonomi Lokal pada Ekowisata Cafe Tebing Bute, Kota Kupang. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi, 4(3), 829–852.

Sidabutar, P. E. E. (2025). Analisis Pengelolaan Sampah Di Pulau Kura Kura Resort Karimunjawa: Studi Keberlanjutan Destinasi Wisata. Jurnal Sains Terapan Pariwisata, 10(2), 154–166.

Suci, D. R., Yurianto, M., & Said, B. D. (2021). Manajemen tata kelola maritim Kepulauan Seribu sebagai Kawasan strategis nasional dalam prespektif keamanan maritim. Jurnal Maritim Indonesia, 9(3), 281–298.

Suleman, S. A., & Bur, S. (2023). Mitigasi Bencana Abrasi Dan Sedimentasi Pantai Pada Di Pesisir Pantai Kabupaten Pangkep. SENSISTEK: Riset Sains Dan Teknologi Kelautan, 56–61.

Suriadi, L. M., Denya, N. P., Shabrina, Q. A., Yuliana, R., Agustina, G., Kuspraningrum, E., & Asufie, K. N. (2024). Perlindungan sumber daya genetik ekosistem mangrove untuk konservasi lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Jurnal Analisis Hukum, 7(2), 234–253.

Susanti, D., Aprianty, H., & Yanto, H. N. (2026). Implementasi Konsep Regenerative Tourism dalam Upaya Mitigasi Kerusakan Pantai di Kawasan Wisata Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(2), 6016–6028.

Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 5(1), 1–22.

Tanjung, E. R., & Albina, M. (2025). Penelitian deskriptif dalam pendidikan. BLAZE: Jurnal Bahasa Dan Sastra Dalam Pendidikan Linguistik Dan Pengembangan, 3(3), 168–176.

Tumpu, M., Jamal, M., Syahrir, M., Pasanda, O. S. R., Lapian, F. E. P., Rustam, M. S. P. A., Adhimastra, I. K., Mustika, W., & Muliawan, I. W. (2023). Infrastruktur berbasis mitigasi bencana. Tohar Media.

Wilda Ummairah, J. (2026). Manajemen Risiko Laboratorium dalam Meningkatkan Keselamatan dan. 7(3).

Ziad, M. T., Ichsan, A. C., & Fahrussiam, F. (2026). Patterns of Fulfilling Life Needs of Communities Around Mangrove Areas Cemara Beach, Lembar District, West Lombok. Jurnal Biologi Tropis, 26(2), 1264–1271.